

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, garis besar manajemen pembangunan mulai mengalami perubahan yaitu bersifat lebih desentralistik melalui otonomi di tingkat daerah. Undang – Undang tersebut mempunyai implikasi serius bagi pelayanan publik di daerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan adanya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, maka laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kami untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan orgnisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan.

Dalam laporan kinerja ini kami menginformasikan capaian – capaian keberhasilan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini akan menjadi titik perubahan perbaikan ke depan untuk menjadi lebih baik.

Bukittinggi, 28 Februari 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

Drs. NOVERDI

NIP. 196611161986021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu bagian terpenting dalam penerapan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Sesuai dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 (LKjIP) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak - pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu LKjIP juga digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

ii

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah melaksanakan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang terangkum dalam 3 (tiga) program melalui APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 Sekretariat DPRD masih mencatat kekurangan disamping keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hal ini kan menjadi catatan bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mempertahankan kinerja yang telah baik dan terhadap kelemahan-kelemahan hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Bukittinggi, 28 Februari 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI



Drs. NOVERDI

NIP. 196611161986021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Bagian Umum dan Keuangan.....	4
1.2.2 Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan.....	7
1.2.3 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan....	8
1.2.4 Struktur Organisasi.....	11
1.2.5 Data Pegawai.....	12
1.3 Isu Strategis.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Perencanaan Kinerja.....	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.1.1 Tujuan Strategis.....	15
2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	24
BAB IV Penutup.....	39
Lampiran.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif yang pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta melibatkan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe C dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 25 orang yang mewakili tiga (3) kecamatan dan 128.783 jiwa penduduk (Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019, BPS Kota Bukittinggi) dengan laju pertumbuhan penduduk 1.56 % pertahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekretariat DPRD merupakan OPD unsur pendukung yang memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasionalnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara Umum Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi berikut : a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan b) Penyelenggaraan administrasi keuangan c) fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Struktur organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi : Drs. Noverdi
- Kepala Bagian Umum dan Keuangan : Musmulyadi, SH
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hendra Eka Putra, SH
- Kasubag Program dan Keuangan : Ishna Rizqi Amalia, SE, ME
- Kepala Bagian Persidangan dan Risalah : Lenny Harlinda, SH, MH
- Kasubag Risalah dan Persidangan : Yudy Andry, SH
- Kasubag Perundang - Undangan : Reni Nofrianti, SH
- Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran : Antonius, SE
- Kasubag Fasilitasi Penganggaran : Hapsah, SAP
- Kasubag Fasilitasi Pengawasan : Ramon Arisa Putra, SE

1.2.1 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat DPRD;
2. mengelola kepegawaian sekretariat DPRD
3. mengelola administrasi keanggotaan DPRD
4. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD
5. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD
6. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD
7. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD
8. menyusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD
9. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD
10. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD
11. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
12. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD
13. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD
14. mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat DPRD
15. memverifikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD
16. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan sekretariat DPRD
17. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD
18. menyusun laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD

Bagian Umum membawahi :

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian umum dan keuangan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a) melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD
- b) melaksanakan kearsipan
- c) menyusun administrasi kepegawaian
- d) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- e) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- f) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
- g) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD
- h) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai
- i) mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks sekretariat DPRD
- j) mengatur dan mengelola keamanan kompleks sekretariat DPRD
- k) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan
- l) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
- m) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
- n) merencanakan pemeliharaan alat – alat kelengkapan
- o) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD

- p) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di sekretariat DPRD
- q) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD
- r) melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Keuangan meliputi perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) menyusun bahan perencanaan
- b) menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran baik murni maupun perubahannya
- c) merencanakan pemverifikasian keuangan
- d) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- e) mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu pejabat pengelola keuangan untuk pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar uang persediaan/ ganti uang/ tambahan/ lumpsum
- f) merencanakan penatausahaan keuangan
- g) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- h) mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban
- i) melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD
- j) menganalisis laporan keuangan
- k) menganalisis laporan kinerja sekretariat DPRD
- l) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

1.2.2 BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN

Bagian persidangan dan perundang - undangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persidangan, rapat –rapat, penyusunan risalah, dan serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian persidangan dan perundang - undangan menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan kajian perundang – undangan
2. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah
3. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif
4. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang – undangan
5. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif
6. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
7. menyusun risalah rapat
8. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah
9. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM)
10. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
11. menyelenggarakan hubungan masyarakat
12. menyelenggarakan publikasi
13. menyelenggarakan keprotokolan

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan membawahi :

1) Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan

Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang persidangan dan perundang – undangan . Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian kajian perundang - undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) melaksanakan kajian perundang – undangan
- b) membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik
- c) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang – undangan

- d) membuat konsep bahan penyiapan draf perda inisiatif
- e) merancang bahan pembahasan perda
- f) menyusun daftar inventarisis masalah (DIM)

2) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi

Sub bagian persidangan, risalah dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan, risalah dan publikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian persidangan, risalah dan publikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan program dan jadwal rapat dan siding
- b) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat – rapat
- c) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD
- d) memfasilitasi rapat – rapat DPRD
- e) menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD
- f) menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- g) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
- h) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD
- i) merencanakan kegiatan DPRD
- j) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD

1.2.3 BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN.

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan merupakan bagian yang menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan dengan tugas yang meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara/ kebijakan umum perubahan anggaran, plafon perubahan anggaran sementara perubahan

2. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan
3. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
4. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya
5. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
6. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik Indonesia
7. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat
8. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan
9. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
10. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
11. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan
12. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD
13. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan membawahi :

1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian fasilitasi penganggaran dan

pengawasan meliputi lingkup fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Sub bagian fasilitasi penganggaran menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara/ kebijakan umum perubahan anggaran plafon perubahan anggaran sementara perubahan
- b) menyusun bahan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan
- c) menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
- d) menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya.
- e) menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- f) menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia

2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Sub bagian fasilitasi pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan meliputi lingkup pengawasan. Sub bagian fasilitasi pengawasan menyelenggarakan fungsi :

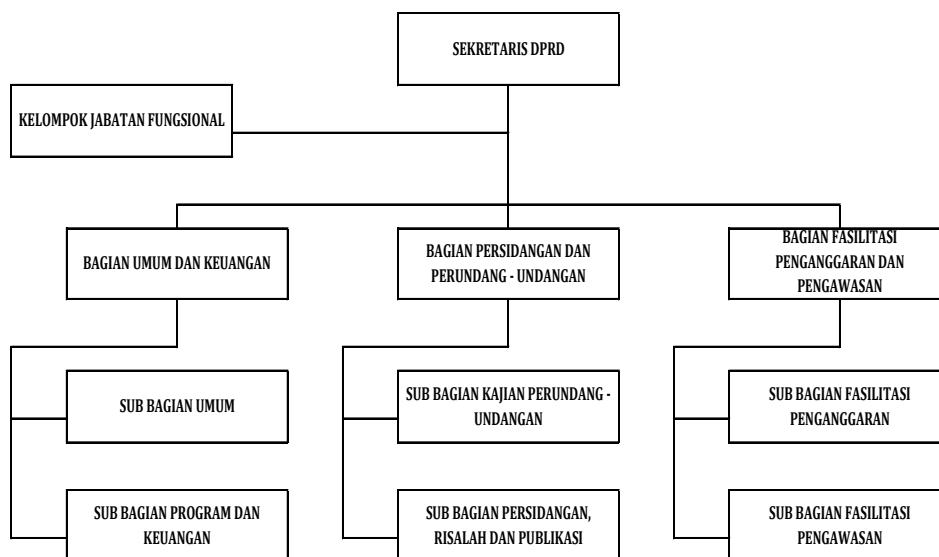
- a) mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan
- b) merancang bahan rapat – rapat internal DPRD
- c) menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
- d) menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
- e) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan

- f) memfasilitasi reses DPRD
- g) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat
- h) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi
- i) menyusun pokok – pokok pikiran DPRD
- j) melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD

1.2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi memiliki 3 orang Kepala Bagian dan 6 orang Kepala Sub Bagian.

Diagram 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi



1.2.5 DATA PEGAWAI

Berdasarkan data kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019, terdapat 37 orang pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- a. 21 orang laki – laki dan 16 orang perempuan
- b. 4 orang berpendidikan Sarjana S2
18 orang berpendidikan Sarjana S1
3 orang berpendidikan D3
11 orang berpendidikan SLTA
1 orang berpendidikan SD

1.3 ISU STRATEGIS

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD selama tahun anggaran 2019 dirangkum sebagai berikut:

- a. Dari segi ketersediaan sumber daya terutama personalia di lingkungan Sekretariat DPRD masih dirasa kurang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memfasilitasi tugas fungsi DPRD maka diperlukan jumlah aparatur yang cakap dan mumpuni pada masing – masing bagian.
- b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD yang masih kurang seperti ketersediaan ruang sidang yang representatif, nyaman dan lengkap.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana kerja. Terlihat dari realisasi anggaran yang sangat tinggi penyerapannya di tahun anggaran, mengakibatkan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- d. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan program dan rencana kerja yang di usulkan.
- e. Adanya pergantian anggota DPRD untuk periode 2019 – 2024 dikarenakan pemilu legislatif tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

LKjIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 Penyusunan LKjIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Oleh karena itu, penyajian LKjIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merumuskan suatu perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) menjelaskan panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Selain itu diperhatikan juga ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut selaras dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertera dalam RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.

2.1 Rencana Strategis 2016-2020

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

2.1.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diselaraskan dengan visi misi Pemerintah Kota Bukittinggi. Misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah :

Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran : Terlaksananya reformasi birokrasi

Dari sasaran tingkat kota tersebut dirumuskanlah tujuan tingkat SKPD yaitu “Terwujudnya DPRD sebagai Lembaga Pemerintah yang Profesional”. Untuk mewujudkan tujuan organisasi ini, maka diperlukan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerjanya. Indikator dari tujuan tersebut adalah :

1. Indeks kepuasan pelayanan
2. Persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama

2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menggambarkan tercapainya tujuan, memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun. Sasaran ditetapkan secara strategis sesuai dengan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD tahun Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD
2. Meningkatnya kinerja lembaga DPRD

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut diperlukanlah kebijakan – kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Kebijakan – kebijakan tersebut adalah :

1. Menganggarkan dan melaksanakan administrasi perkantoran
2. Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur.
4. Menganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Menganggarkan dan melaksanakan kegiatan jumlah survei tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan.
6. Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD.
7. Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah.
8. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD.
9. Fasilitasi dan penyelenggaraan rapat – rapat (paripurna, fraksi, alat kelengkapan DPRD).
10. Menganggarkan dan menyelenggarakan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses.
11. Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD.
12. Menyediakan dan membangun sistem penyampaian informasi dan kaduan masyarakat ke DPRD.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	78
2.	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama.	80%

Dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2019 jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD adalah sebesar **Rp.29.307.064.677,-** untuk memfasilitasi 3 program dan 44 kegiatan. Dengan rincian pagu anggaran per program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 15 kegiatan pagu anggaran Rp.7.785.862.182,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 14 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.865.206.910,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dengan 15 kegiatan dan pagu anggaran Rp. 19.655.995.585,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dilihat kesesuaian pengukuran hasil kinerja dengan setiap sasaran strategis yang terdapat dalam indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Tabel 3.1 menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Target dan Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	78	78,03	100,03%
Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama	80%	66.5%	86.36%

Tabel 3.1 diatas menjelaskan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD adalah nilai Indeks Kepuasan Pelayanan dari SKPD Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2019 yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada anggota DPRD. Nilai Indeks Kepuasan Pelayan yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 78,03 yang berarti nilai mutu dari angka ini adalah B. Nilai B mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD, dan perlu ditingkatkan lagi kualitasnya.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kinerja lembaga DPRD dinilai berdasarkan jumlah raperda yang dihasilkan oleh DPRD. Pada tahun 2019 berdasarkan Laporan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi tahun 2019, DPRD Kota Bukittinggi telah menyelesaikan pembahasan 11 raperda. Jika dilihat dari target yang terdapat pada indikator kinerja utama, untuk tahun 2019 ditargetkan dapat menyelesaikan 6 raperda inisiatif DPRD. Sedangkan untuk raperda yang dihantarkan di tahun 2019 selain inisiatif DPRD adalah 11 raperda, dan semua raperda ini telah selesai dibahas dan telah disepakati dalam nota persetujuan bersama Walikota dan Pimpinan DPRD. Persentase realisasi penyelesaian raperda ini adalah 66,5%. Realisasi ini tidak sesuai dengan target tidak berarti bahwa kinerja DPRD Kota Bukittinggi tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi Pemilihan Umum untuk pemilihan legislatif periode 2019 – 2024. Setelah pelantikan anggota DPRD periode 2019 – 2024, pelantikan pimpinan DPRD kota Bukittinggi juga mengalami keterlambatan dikarenakan keterlambatan usulan yang diberikan oleh partai politik.

Pada tahun 2019 tingkat capaian kinerja fisik kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi rata – rata 90.63 % dan persentase realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 73.16% dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi anggaran adalah sebesar 83.60% maka secara serapan anggaran untuk Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10.44%. Hal ini terjadi juga dalam pencapaian kinerja fisik untuk tahun 2019, terdapat penurunan sebesar 6.62% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 97.25% di tahun 2018.

Dengan capaian kinerja fisik kegiatan di tahun 2019 sebesar 90.63% Sekretariat DPRD telah cukup baik dalam realisasi pelaksanaan kegiatan. Dilihat dari capaian terhadap indikator kinerja utama Sekretariat DPRD dimana untuk tahun 2019 untuk indikator kinerja utama indeks kepuasan pelayanan bagi pimpinan dan anggota DPRD dari target yang ditetapkan sebesar 78 berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang disebarkan kepada 25 anggota DPRD diperoleh hasil hitung indeks kepuasan pelayanan sebesar 78.03. Dengan nilai yang diperoleh capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelayanan adalah 100.03%. Sedangkan untuk indikator kinerja kedua yakni peningkatan persentase kinerja DPRD dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 80% yang dihitung dari persentase raperda yang disetujui melalui nota persetujuan bersama, persentase untuk tahun 2019 terhadap kinerja DPRD tersebut adalah sebesar 66.5%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah raperda yang dihantarkan oleh Pemerintah Daerah yang berjumlah 9 raperda dan selesai dibahas seluruhnya oleh Anggota DPRD. Namun untuk raperda inisiatif dari 6 rancangan didalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) hanya 2 raperda yang dihantarkan dan selesai dibahas sampai dengan nota persetujuan bersama. Dilihat dari perda inisiatif DPRD maka persentase kinerja DPRD adalah $2/6 \times 100\% = 33.3\%$. Sehingga secara total diperoleh nilai persentase kinerja DPRD untuk tahun 2019 adalah sebesar 66.5%. Nilai tersebut naik sebesar 4.6% dari tahun sebelumnya, dimana capaian tahun sebelumnya adalah 61.90% untuk indikator peningkatan Kinerja DPRD. Namun tidak dapat dipungkiri beberapa hal tersebut dibawah ini menjadi rangkuman penyebab penurunan kinerja fisik kegiatan di tahun 2019 :

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten dan penempatan staf yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan.

2. Keterlambatan penetapan peraturan daerah yang disebabkan hal – hal tertentu diluar kewenangan sekretariat DPRD seperti terlambatnya penetapan pimpinan definitif DPRD periode 2019 – 2024 mengakibatkan perubahan pada agenda Dewan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Keterbatasan lahan parkir di sekitar Kantor DPRD

Strategi/ Upaya pemecahan masalah :

1. Penempatan Sumber daya sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan
2. Diupayakan pada saat pembahasan raperda dapat dilaksanakan tepat waktu dan Anggota Dewan telah difasilitasi dengan aturan – aturan dan informasi terbaru juga bahan dari skpd terkait raperda yang akan dibahas.
3. Memanfaatkan lahan parkir milik Pemda yang berlokasi disebelang Kantor DPRD dan meminta bantuan pengaturan lalulintas dan parkir dari skpd terkait selama rapat berlangsung.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	-	-	74	76,51	76	77.82	78	78,03
Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama	-	-	70%	43,33%	75%	61,90%	80%	66.5%

Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan capaian kinerja untuk sasaran strategis Sekretariat DPRD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 tidak terdapat target dan realisasi terhadap sasaran dan indikator kinerja terkait dikarenakan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja ini dilaksanakan baru pada tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk indikator kinerja utama 1 yakni meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD terus meningkat dan melewati target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja 2 yakni meningkatnya kinerja lembaga DPRD realisasi kinerja selalu dibawah target yang ditetapkan dari tahun 2017 – 2019, hal ini cukup menjadi perhatian kedepannya dalam upaya meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari persentase capaian dari tahun ke tahun terlihat ada peningkatan terhadap realisasi capaian kinerja yakni dari 43,33% di tahun 2017 menjadi 66.5% di tahun 2019.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Sekretariat DPRD pada tahun 2019 melaksanakan urusan pemerintahan fungsi pendukung dengan melaksanakan 3 (tiga) program dan 44 kegiatan. Jumlah anggaran total yang dikelola tertuang dalam dua Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni DPA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan DPA Sekretariat DPRD. Untuk DPA DPRD hanya terdiri atas Belanja Tidak Langsung tunjangan dan gaji Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah anggaran Rp. 11.857.571.400,- terealisasi sebesar Rp. 11.419.264.049,-, sedangkan untuk DPA Sekretariat DPRD terdiri atas Rekening Belanja Tidak Langsung pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD dan Belanja Langsung yang terbagi dalam jenis belanja barang jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja modal dengan jumlah anggaran Rp.33.322.295.277,- yang terdiri dari;

Tabel 3.3
Laporan Realisasi Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	4.094.630.600	3.892.403.894
2.	Belanja Barang dan Jasa	27.671.414.677	20.482.434.457
3.	Belanja Modal	1.556.250.000	918.186.000
	Jumlah	33.322.295.277	25.293.024.351

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan SKPD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi kantor dilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran dari program pelayanan administrasi kantor ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.7.785.862.182,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.601.355.627,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran mencapai angka 84,79 %.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kegiatan ini adalah jumlah materai, perangko dan buku cek dengan target tercapainya penyediaan buku cek 5 buku, materai 3000 sebanyak 200 lembar, materai 6000 sebanyak 600 lembar serta tersedianya fasilitasi jasa pengiriman dokumen sebanyak 10 paket, maka dialokasikan dana sebesar Rp. 5.200.000,- terealisasi Rp. 3.297.000,- dan tingkat realisasi 63.4% dengan realisasi fisik 90%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kegiatan ini adalah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan tv kabel dengan target 7 item rekening dalam 12 bulan, maka dialokasikan dana sebesar Rp. 265.000.000,- terealisasi Rp. 213.294.845,- dan tingkat realisasi 80.49% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan untuk 21 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua selama 12 bulan dengan target 100% dan alokasi dana sebesar Rp. 455.170.000,- terealisasi Rp. 354.676.694,- dan tingkat realisasi 77,92% dengan realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan dan peralatan kebersihan kantor sebanyak 5 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.215.660,- terealisasi Rp. 202.977.480, - dan tingkat realisasi keuangan sebesar 96,56% serta realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 50 item dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 14.893.629,-dan tingkat realisasi 99,29% serta realisasi fisik 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya belanja fotokopi untuk keperluan kantor selama 12 bulan dan barang cetakan sebanyak 12 item dengan jumlah dana Rp.

35.000.000,- terealisasi Rp. 31.756.980,- tingkat realisasi 90,73% serta realisasi fisik 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya komponen alat listrik dan elektronik sebanyak 13 item dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.309.300,- terealisasi Rp. 17.296.400,- tingkat realisasi 99,93% serta realisasi fisik 100%.

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya komponen alat listrik dan elektronik sebanyak 13 item dengan alokasi dana sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi Rp. 342.805.400,- tingkat realisasi 97,94% serta realisasi fisik 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum lembur pegawai selama 12 bulan dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 16.309.700,- tingkat realisasi 81,55% serta realisasi fisik 100%..

10. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya 3 paket perjalanan dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.150.000.000,- terealisasi Rp.3.510.042.119,- tingkat realisasi 84,58% serta realisasi fisik 100%.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya upah kerja non PNS selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 381.893.782,- terealisasi Rp. 354.350.880,- tingkat realisasi 92,79% serta realisasi fisik 100%.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya upah kerja jasa pengamanan kantor selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.557.000,- tingkat realisasi 98,78% serta realisasi fisik 100%

13. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indikator kegiatan ini adalah adalah honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 50 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 12.854.000,- tingkat realisasi 25,71% serta realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini diakibatkan kurangnya evaluasi mengenai jumlah paket pengadaan yang memerlukan honor pejabat pengadaan, PPHP , PTK dan PPK. Untuk kedepannya dapat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap paket – paket pengadaan yang memerlukan pembayaran honorarium terkait pejabat pengadaan barang jasa, PPHP, PTK dan PPK.

14. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya penerimaan tamu DPRD selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar 1.431.073.440,- terealisasi Rp. 1.329.243.500,- , tingkat realisasi 92,88% serta realisasi fisik 100%.

15. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD sebanyak 25 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 0,- tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan padatnya agenda

dan jadwal pimpinan dan anggota DPRD terpilih periode 2019 – 2024.

Pada umumnya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran tidak mengalami permasalahan yang signifikan pada realisasi fisik kegiatan dengan tingkat realisasi rata-rata kegiatan pada program ini sebesar 100%. Adapun pada realisasi anggaran yang tidak mencapai 85% lebih kepada pencairan anggaran disesuaikan dengan jumlah real kebutuhan selama 12 bulan. Untuk meningkatkan capaian serapan anggaran pada program ini kedepannya maka alokasi anggaran untuk tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana kantordilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran dari program peningkatan sarana dan prasarana kantor ini adalah meningkatnya persentase sarana dan prasarana.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.865.206.910,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.087.690.660,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar 58,31 %.

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya 1 unit kendaraan operasional Sekretariat DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.600.000,- serta realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan sebanyak 12 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 352.240.000,- terealisasi Rp. 91.735.250,- tingkat realisasi 26,04% serta realisasi fisik 80%.

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan.

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah jabatan sebanyak 3 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.996.910,- terealisasi Rp. 22.895.750,- tingkat realisasi 49,78 % serta realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan serta harga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan.

4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur kantor sebanyak 4 paket, dengan alokasi dana sebesar Rp. 108.500.000,- terealisasi Rp. 87.670.000,- tingkat realisasi 80,80% serta realisasi fisik 90%.

5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor sebanyak 8 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 546.600.000,- terealisasi Rp. 508.699.500,- tingkat realisasi 93,07% serta realisasi fisik 90%.

6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan kantor sebanyak 8 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 209.970.000,- teralisasi Rp. 45.669.000,- tingkat realisasi 21,75 % s/erta realisasi fisik 80%. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan adanya dua item belanja yang tidak direalisasikan yakni belanja kelengkapan lapangan dan alat pembersih udara. Dalam upaya menaikkan penyerapan anggaran maka perencanaan untuk pengadaan perlengkapan kantor hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah jabatan selama 12 bulan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi Rp. 25.146.460,- tingkat realisasi 55,88% serta realisasi fisik 90%. Rendahnya realisasi anggaran ini dikarenakan kondisi sarana dan prasarana rumah dinas masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan tidak dikeluarkan. Akan tetapi untuk kegiatan pemeliharaan dana tetap dianggarkan dari awal tahun, dan penetapan pagu akan disesuaikan pada perubahan anggaran jika tidak terpakai akan dikurangkan atau dinolkan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi Rp. 56.598.000,- tingkat realisasi 26,95% dan realisasi fisik 80%. Tingkat penyerapan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan pembayaran premi asuransi gedung kantor yang tidak direalisasikan dikarenakan premi asuransi gedung kantor akan dipergunakan untuk gedung baru sedangkan saat ini Sekretariat DPRD masih menempati gedung kantor lama. Solusi kedepan untuk belanja premi asuransi gedung kantor akan dianggarkan sesuai kebutuhan.

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan selama 12 bulan. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 9.900.000,- tingkat realisasi 99% serta realisasi fisik 100%.

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.025.000,-. Tingkat realisasi anggaran sebesar 30,13% dan capaian fisik 80%. Realisasi capaian fisik dan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran.

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan rumah jabatan selama 12 bulan seperti TV, Komputer, Kulkas, Dispenser. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 5.133.200,-tingkat realisasi 34.22% serta realisasi fisik 80%. Realisasi anggaran dan fisik kegiatan ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi sarana dan prasarana rumah dinas masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Untuk kegiatan pemeliharaan dana tetap dianggarkan pada awal tahun anggaran, namun pagunya dapat disesuaikan pada perubahan anggaran jika tidak terpakai akan dikurangkan atau dinolkan.

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 23.813.500,- tingkat realisasi 95,24% serta realisasi fisik 100%.

13. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 2 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi Rp.5.805.000,-. Tingkat realisasi 84.13% dan realisasi fisik 100%.

14. Kegiatan Pemulangan Jenazah

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemulangan jenazah sebanyak 2 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi Rp. 0,- dan fisik 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini karena tidak terjadi musibah yang menyebabkan kematian bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun 2019.

c. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya dan Meningkatkan kinerja lembaga DPRD. Adapun sasaran dari program peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan persidangan dan rapat – rapat DPRD, meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan, meningkatnya fungsi legislasi dan meningkatnya fasilitasi terhadap fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 19.655.995.585,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.751.272.170,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,33%. Adapun kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah rapat – rapat paripurna istimewa DPRD sebanyak 10 kali dengan alokasi dana Rp. 849.556.450,- terealisasi Rp. 601.683.150,- tingkat realisasi anggaran 70,82% dengan realisasi fisik 100%. Pada kegiatan ini terdapat beberapa rapat – rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak membutuhkan biaya sewa tempat, tenda, kursi, meja serta perlengkapan lainnya, tetapi anggaran untuk biaya sewa ini harus disediakan.

2. Kegiatan Reses

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan sebanyak 84 kali yang terdiri atas reses perorangan dan reses kelompok. Alokasi dana Rp. 626.197.500,- terealisasi Rp. 375.013.250,- tingkat realisasi 59,89% serta realisasi fisik 100%. Pada masa sidang terakhir sesuai dengan keputusan pada rapat badan musyawarah, reses dilaksanakan per kelompok tidak perorangan.

3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun sebanyak 6 kali dengan alokasi dana sebesar Rp.3.278.000.000,- teralisasi Rp. 1.948.812.800,- tingkat realisasi 59,45% serta realisasi fisik 90%. Keterlambatan penetapan pimpinan definitif yang mengakibatkan keterlambatan pembentukan alat - alat kelengkapan dewan, sehingga kegiatan bimbingan teknis tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

4. Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan dan Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya suara dewan di media elektronik sebanyak 10 kali, pariwisata di media cetak sebanyak 15 kali, berita dewan di media cetak dan elektronik sebanyak 1000 berita dengan alokasi dana Rp. 145.555.780,- terealisasi Rp. 110.555.500,- tingkat realisasi 75,95% serta realisasi fisik 95%. Capaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk efisiensi anggaran.

5. Promosi Melalui Media Massa, Profil dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumentasi dan promosi seluruh kegiatan DPRD sebanyak 800 produk dengan alokasi dana Rp. 310.948.000,- terealisasi Rp.238.335.000,- tingkat realisasi 76,65% serta realisasi fisik 90%. Pelaksanaan kegiatan ini tergantung dengan volume kegiatan kedewanan seperti peninjauan ke lapangan bersama wartawan, pembuatan baliho atau spanduk yang sesuai dengan kebutuhan DPRD.

6. Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli

Indikator kegiatan ini adalah honorarium tenaga ahli fraksi sebanyak 7 fraksi. Dengan alokasi dana untuk honorarium tenaga ahli fraksi sebesar Rp.189.000.000,- terealisasi Rp. 109.750.000,- tingkat realisasi 55,95% dan realisasi fisik 100%. Pada tahun 2019, terdapat anggota DPRD dengan periode 2019 – 2024, pada periode ini berdasarkan Tata Tertib DPRD disepakati bahwa terdapat 6 fraksi.

7. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan sebanyak 1 dokumen. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.438.000,- tingkat realisasi 98,88% serta realisasi fisik 100%.

8. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi anggota DPRD sebanyak 1 dokumen dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 49.383.000,- tingkat realisasi 98,77% serta realisasi fisik 100%.

9. Penunjang Kegiatan Kerjasama Asosiasi DPRD se - Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya iuran adeksi dan asdeksi yang terbayar sebanyak 2 paket, kontribusi keikutsertaan asdeksi dan adeksi sebanyak 2 paket, pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebanyak 2 paket dengan alokasi dana sebesar Rp.1.700.000.000,- teralisasi Rp. 824.045.250,- tingkat realisasi 48,47% dan realisasi fisik 100%. Tidak cukup waktu pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi undangan Adeksi dikarenakan padatnya agenda DPRD, sehingga kegiatan adeksi hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun dari yang direncanakan sebanyak 3 kali.

10. Penyusunan Produk Hukum Inisiatif Dewan

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya produk hukum DPRD sebanyak 4 produk dengan alokasi dana sebesar Rp. 401.378.315,- teralisasi Rp. 43.155.110,- tingkat realisasi keuangan 10,75% dan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya capaian realisasi anggaran disebabkan karena Karena keterlambatan penetapan pimpinan definitif yang mengakibatkan keterlambatan pembentukan alat - alat kelengkapan dewan.

11. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas anggota DPRD beserta kelengkapannya sebanyak 300 stel dengan alokasi dana sebesar Rp. 726.000.000,- terealisasi Rp. 305.25.000,- tingkat realisasi 42,05% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dalam perencanaan penganggaran pada awalnya adalah untuk pakaian dinas anggota DPRD periode 2014 - 2019 dan periode 2019 - 2024, namun sesuai PP 18/2017 bahwa masing - masing anggota DPRD telah mempunyai hak dengan jumlah tertentu dalam satu

periode, sehingga untuk anggota DPRD periode 2014 - 2019 tidak lagi diberikan karena seluruh hak terkait pakaian dinas telah terpenuhi.

12. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi Rp. 171.356.500,- tingkat realisasi 81,60% serta realisasi fisik 100%.

13. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya rapat – rapat penganggaran dan pengawasan sebanyak 15 kali dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.697.199.000,- terealisasi Rp. 4.997.025.140 serta realisasi fisik 87,71%.

14. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan, Risalah dan Publikasi

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya rapat – rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 120 rapat, terdokumentasinya risalah rapat tepat waktu sebanyak 120 risalah rapat, terlaksananya jasa publikasi kegiatan dewan sebanyak 200 kali dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.354.920.270,- terealisasi Rp. 3.879.319.470 serta realisasi fisik 72,44%.

15. Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honorarium ajudan, staf TUP dan sopir pimpinan DPRD sebanyak 5 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.239.600,- terealisasi Rp. 52.150.000,- tingkat realisasi 77,56% dengan realisasi fisik 100%.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merencanakan dan melaksanakan 44 (empat puluh empat kegiatan) kegiatan dalam 3 (tiga) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD ke Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang selaras dengan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagai SKPD Penunjang, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi mendukung misi 2 RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran strategis terlaksananya reformasi birokrasi. Sasaran SKPD Sekretariat DPRD terdiri dari 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD kota Bukittinggi dengan target kinerja nilai indeks kepuasan pelayanan anggota DPRD 78 realisasi bernilai 78,03. Untuk sasaran kedua sasarannya adalah meningkatnya kinerja lembaga DPRD dengan indikator kinerja persentase ranperda yang ditetapkan melalui persetujuan bersama. Pada tahun 2019 indikator pada sasaran kedua ini memiliki target sebesar 80% dan realisasi sebesar 66,5%.

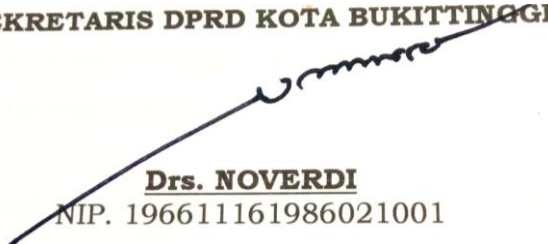
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan. Hambatan tersebut berkaitan dengan adanya pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 yang membuat beberapa agenda DPRD tidak terlaksana sesuai jadwal dan adanya keterlambatan pelantikan pimpinan DPRD terpilih.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memotivasi seluruh personil agar meningkatkan kualitas sehingga mampu memberikan kinerja optimal dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Melaksanakan perencanaan yang baik dari sisi kegiatan dan penganggaran sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran dan tingginya tingkat kinerja Sekretariat DPRD kedepannya.

Bukittinggi, 28 Februari 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

A handwritten signature in dark ink, slanted upwards from left to right, crossing over the printed name and NIP.

Drs. NOVERDI

NIP. 196611161986021001

LAMPIRAN

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2019

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN			PERMASALAHAN (Capaian Fisik atau Anggaran dibawah 85%)	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan - kegiatan terkait pelayanan administrasi perkantoran sesuai target	100%	92%	92%	Rp 7.785.862,182	Rp 6.601.355,227	84,79%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terdapatnya fasilitas administrasi kantor terkait surat menyurat dengan cukup	100%	90%	90%	Rp 5.200,000	3.297,000	63,40%	Sesuai kebutuhan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase bulan terfaksilainya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, internet dan TV kabel dengan baik	100%	100%	100%	Rp 265.000,000	213.294,845	80,49%	Sesuai kebutuhan	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase bulan Terdapatnya fasilitas jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan baik	100%	100%	100%	Rp 455.170,000	354.676,694	77,92%	Sesuai kebutuhan	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase bulan terdapatnya fasilitas jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	Rp 210.215,660	202.977,480	96,56%		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terdapatnya alat tulis kantor sesuai rencana	100%	100%	100%	Rp 15.000,000	14.893,629	99,29%		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase bulan terdapatnya fasilitas penggandaan dan barang cetakan	100%	100%	100%	Rp 35.000,000	31.756,980	90,73%		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Persentase terdapatnya komponen dan alat peningkatan bangunan kantor dengan baik	100%	100%	100%	Rp 17.309,300	17.296,400	99,93%		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terfaksilainya makan dan minuman lembur sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	Rp 20.000,000	16.309,300	81,55%	Sesuai kebutuhan	
9	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Pelayanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase terfaksilainya koordinasi dan konsultasi dan pelayanan dinas lainnya sesuai rencana	100%	100%	100%	Rp 4.150.000,000	3.510.042,119	84,58%	Sesuai kebutuhan	
10	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Persentase bulan terdapatnya upah kerja pegawai non PNS	100%	100%	100%	Rp 381.893,782	354.350,880	92,79%		
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Persentase bulan terfaksilainya pengamanan kantor	100%	100%	100%	Rp 200.000,000	197.557,000	98,78%		
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase terdapatnya honorarium PPPK sesuai rencana	100%	100%	100%	Rp 50.000,000	12.854,000	25,71%	Sesuai kebutuhan	
13	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terdapatnya bahan baku dan peraturan Per UU	100%	90%	90%	Rp 350.000,000	342.805,400	97,94%		
14	Pemeriksaan Kunjungan Tamu DPRD	Persentase terfaksilainya makan minum tamu pimpinan	100%	100%	100%	Rp 1.431.073,440	1.329.243,500	92,88%		
15	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan Anggota DPRD dalam medical cek up sesuai rencana	100%	0%	0%	Rp 200.000,000	-	0,00%	Padaanya agenda dan jadwal pimpinan dan anggota DPRD terpilih periode 2019 - 2024	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan baik	76	77,61	102,12%	Rp 1.865.206,910	1.087.690,660	58,31%		
16	Pengadaan Perlatan Kantor	Persentase terdapatnya peralatan kantor sesuai rencana	100%	90%	90,0%	Rp 546.600,000	508.699,500	93,07%		

17	Pengujian Perangkat Keras	Persentase keberhasilan pengujian kabel sesuai rencana	100%	80%	80.0%	Rp 209.970.000	45.669.000	21.75%	Sexual kebutuhan	
18	Pengujian koneksi antar domain operasional	Persentase keberhasilan koneksi antar operasional sesuai rencana	100%	100%	100.0%	Rp 200.000.000	190.000.000	99.10%		
19	Pengujian konektivitas	Persentase keberhasilan koneksi antar sistem rencana	100%	90%	90.0%	Rp 108.500.000	87.670.000	80.80%	Sexual kebutuhan	
20	Pemeliharaan Rutin / Bersih Gedung Kantor	Persentase keberhasilan pemeliharaan gedung kantor sesuai rencana	100%	80%	80.0%	Rp 210.000.000	56.590.000	26.95%	Sexual kebutuhan	
21	Pengujian Perangkat Rumah Jabatan / Dinas	Persentase keberhasilan pengujian rumah jabatan sesuai rencana	100%	80%	80.0%	Rp 352.240.000	91.735.250	26.04%	Sexual kebutuhan	
22	Pengujian Perangkat Rumah Jabatan / Dinas	Persentase keberhasilan pengujian jabatan sesuai rencana	100%	100%	100.0%	Rp 45.996.910	22.895.750	49.78%	Sexual kebutuhan	
23	Pemeliharaan Rutin / Bersih Rumah Jabatan / Dinas	Persentase keberhasilan pemeliharaan rumah jabatan sesuai rencana	100%	90%	90.0%	Rp 45.000.000	25.146.460	55.88%	Sexual kebutuhan	
24	Pemeliharaan Rutin / Bersih Perangkat Rumah Jabatan / Dinas	Persentase keberhasilan pemeliharaan perangkat rumah jabatan sesuai rencana	100%	100%	100.0%	Rp 10.000.000	9.900.000	99.00%		
25	Pemeliharaan Rutin / Bersih Perangkat Rumah Jabatan / Dinas	Persentase keberhasilan pemeliharaan peralatan rumah jabatan sesuai rencana	100%	80%	80.0%	Rp 15.000.000	5.133.200	34.22%	Sexual kebutuhan	
26	Pemeliharaan Rutin Bersih Perangkat Gedung Kantor	Persentase keberhasilan pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai rencana	100%	100%	100.0%	Rp 25.000.000	23.813.500	95.25%		
27	Pengadaan Perangkat Rumah Tangga	Persentase keberhasilan pengadaan barang sesuai rencana	100%	100%	100.0%	Rp 6.900.000	5.805.000	84.13%	Sexual kebutuhan	
28	Pemeliharaan Rutin / Bersih Perangkat Gedung Kantor	Persentase keberhasilan pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai rencana	100%	80%	80.0%	Rp 20.000.000	6.025.000	30.13%	Sexual kebutuhan	
29	Pemilihan Jenazah	Persentase terdapatnya biaya pemilihan jenazah bagi anggota DPRD yang meninggal seal melaksanakan dinas di luar daerah	100%	0%	0.0%	Rp 70.000.000	-		Tidak ada Anggota DPRD yang meninggal dunia - namun kegiatan harus tetap dilaksanakan	
III	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Pemilihan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya fasilitas kegiatan terkait peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD sesuai target	100%	78.2	7820.00%	Rp 19.655.995.585	Rp 13.751.272.170	69.96%		
30	Rapat-Rapat Paripurna Internal DPRD	Persentase pelaksanaan sidang rapat- rapat dan kegiatan dewan berjalan lancar dan sesuai rencana	80%	80%	100.00%	Rp 849.556.450	601.683.150	70.82%	Sexual kebutuhan	
31	Kegiatan Rees	Persentase peningkatan pelaksanaan terkait dengan masyarakat dan pihak terkait	80%	80%	100.00%	Rp 626.197.500	375.013.250	59.89%	Pada masa sidang terakhir sexual dengan keputusan pada rapat barumus revisi dilaksanakan perlempok tidak perancangan sehingga terjadi silpa cukup besar karena penganggaran adalah untuk revisi perserangan	
32	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase anggota DPRD yang lulus	80%	76%	95.00%	Rp 3.278.000.000	1.948.812.800	59.45%	karena keterlambatan penetapan pimpinan definitif yang mengakibatkan keterlambatan pemberian alat - alat kepengkasan dewan	
33	Pelaksanaan Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	Persentase kegiatan DPRD yang terlaksana pada media cetak dan elektronik	80%	72%	90.00%	Rp 145.555.780	110.555.500	75.95%	Sexual kebutuhan	
34	Promosi Media Massa, Print & Dokumen Kegiatan DPRD	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi link hierarchisnya	80%	80%	100.00%	Rp 310.948.000	238.335.000	76.65%	Sexual kebutuhan	

35	Penyeng Tenaga ANI FraksiSial ANI	Persentase produk hukum insiatif pendak yang dihasilak sesuai rencana kerja	100%	80%	80.00%	Rp	189,000,000	105,750,000	55.95%	Adanya selang waktu antara terhadap penunjak tenaga ahli fraksi karena terjadinya pemutaran anggota Dewan periode 2014 - 2019 ke periode 2019 - 2024	
36	Penyusunan Standarasi Turunjak Perumahan Pimpnan dan Anggota DPRD	Persentase pembayaran gaji dan turunjak dewan sesuai aturan dan tepat waktu	100%	80%	80.00%	Rp	50,000,000	49,438,000	98.88%		
37	Peraturan Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Persentase penunjak pelaksanaan kegiatan terkait dengan masyarakat dan pihak terkait	80%	80%	100.00%	Rp	1,700,000,000	824,045,250	48.47%	Sesuai kebutuhan	
38	Penyusunan Produk Hukum insiatif DPRD	Persentase penunjak jumlah produk hukum insiatif DPRD	80%	80%	100.00%	Rp	401,378,985	43,155,110	10.75%	Sesuai kebutuhan	
39	Pengadaan Pakelan Dinas Besara Kelembaganya	Persentase pengadaban sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan tepat waktu	100%	100%	100.00%	Rp	726,000,000	305,250,000	42.05%	Penganggaran untuk pakelan dinas DPRD adalah untuk DPRD periode 2014 - 2019 dan DPRD periode 2019 - 2024, sedangkan realisasinya Anggota DPRD periode 2014 - 2019 tidak lagi mendapatkan pakelan dinas karena jumlah pakelan dinas yang diperoleh telah sesuai dengan PP 18 tahun 2017	
40	Batena Rumah Tangga Pimpnan DPRD	Persentase pengadaban sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan tepat waktu	100%	100%	100.00%	Rp	210,000,000	171,356,500	81.60%	Sesuai kebutuhan	
41	Penyenggaraan pengemasan dan pengungkapan	Persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat terkait fasilitas pengungkapan dan pengungkapan dilaksanakan sesuai rencana	80%	72%	90.00%	Rp	5,697,199,000	4,997,025,140	87.71%		
42	Penyenggaraan persatuan nstah dan publikasi	Persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat terkait komisi, hampenda, banmas dilaksanakan sesuai rencana	80%	80%	100.00%	Rp	5,354,920,270	3,879,319,470	72.44%	Keterlambatan pelantikan pimpnan definitif yang berdampak terhadap terlambatnya pembentukan alkei dan pelaksanaan studi banding dan kunjungan kerja	
43	Penyusunan Standarasi Turunjak transportasi Pimpnan dan Anggota DPRD	Persentase pembayaran gaji dan turunjak dewan sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	100.00%	Rp	50,000,000	49,383,000	98.77%		
44	Peraturan operasional kedinasan pimpnan DPRD	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keproklakanya	100%	90%	90.00%	Rp	67,239,600	52,150,000	77.56%	Sesuai kebutuhan	

Bukittinggi, 31 Desember 2019
Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi

Drs. Novardi
NIP. 19661116198021001

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2019
SESUAI DENGAN PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN														
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	4	3	5	2	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4
7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	3	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
9	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4
10	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	4
11	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5
12	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	4
13	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
15	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4
16	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4
17	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4
18	4	4	5	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5
19	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5
20	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
21	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
22	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
23	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5
24	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
25	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5
Σ Nilai /Unsur	104	98	97	98	91	94	98	98	101	96	98	102	105	96	102
NRR /Unsur	4.16	3.92	3.88	3.92	3.64	3.76	3.92	3.92	4.04	3.84	3.92	4.08	4.2	3.84	4.08

NRR Tertimbang/u nsur	0.27456	0.25872	0.25608	0.25872	0.24024	0.24816	0.25872	0.25872	0.26664	0.25344	0.25872	0.26928	0.2772	0.25344	0.26928
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

Sangat memuaskan	5	jumlah nilai seluruh unsur	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan
memuaskan	4	3.90192	78.0384	B
cukup memuaskan	3			
tidak memuaskan	2			
sangat tidak memuaskan	1			

Nilai unsur	Nilai komponen n umum dan keuangan	Nilai unsur	nilai komponen n risalah dan persidang an	Nilai unsur	Nilai komponen pengangara n dn pengawasan
2.59248	77.7744	0.77616	77.616	0.53328	79.992

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD	Kuesioner yang disebar di Sekretariat DPRD	72	74	76	78	80	82
2	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah raperda yang diajukan dalam rencana kerja dibagi dengan jumlah raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Dokumen	68%	70%	75%	80%	85%	90%

Diketahui oleh,
WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAMLAN NURMATIAS, SH

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI


Drs. HERMANSYAH, M.Si
NIP. 196109241982101001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HERMANSYAH, M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH
Jabatan : Walikota Bukittinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Maret 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


M. RAMLAN NURMATIAS, SH


Drs. HERMANSYAH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	78
2.	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	80%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.759.244.591,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.573.406.910,-
3.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 16.551.343.450,-

Bukittinggi, Maret 2019

WALIKOTA 


M. RAMLAN NURMATIAS, SH

SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI


Drs. HERMANSYAH, M.Si